



Collaborative Governance dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo

Arnita Putri Wulandari ^{1*}, Putri Septriana Haganta Ginting ², Monique Kurnia Hidayati Zulkarnain ³, Tukiman Tukiman ⁴

¹⁻⁴ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis: 22041010184@student.upnjatim.ac.id ^{1*}, 22041010054@student.upnjatim.ac.id ², 22041010207@student.upnjatim.ac.id ³, tukiman_upnjatim@yahoo.com ⁴

Abstract: This study aims to analyze how the implementation of collaborative governance in the Nutritious Food Yard Program (P2B) strengthens community-based food security in Sidoarjo Regency. A qualitative approach with a case study method was used to explore the social dynamics in depth. The research was conducted in Kampung Edukasi Sampah, Sekardangan Sub-district, one of the active areas in P2B implementation. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving key stakeholders such as the Sidoarjo City Food and Agriculture Office, Sidoarjo Police Sector, village officials, farmer groups, and environmental cadres. The analysis applied the collaborative governance model by Ansell and Gash (2008), which includes five indicators: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. The findings show that most indicators of collaboration have been realized, particularly in communication and trust-building aspects. However, some challenges remain, including the absence of formal agreement documents among actors, inconsistent communication, lack of program outreach, and overlapping roles between the police and related agencies. This research contributes to strengthening cross-sectoral collaboration models in community-based food security programs in urban areas.

Keywords: collaborative governance, food security, Nutritious Food Yard Program (P2B), Urban Agriculture Policy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali dinamika sosial secara mendalam. Lokus penelitian berada di Kampung Edukasi Sampah, Kelurahan Sekardangan, yang telah aktif melaksanakan program P2B. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pemangku kepentingan utama, seperti Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo, Polsek Kota Sidoarjo, aparat kelurahan, kelompok tani, dan kader lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup lima indikator: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kolaborasi telah terbentuk, khususnya dalam aspek komunikasi langsung dan kepercayaan antaraktor. Namun, kelemahan masih terdapat pada kurangnya dokumen kesepakatan formal antara beberapa pihak, komunikasi yang belum konsisten, minimnya kegiatan penyuluhan, serta tumpang tindih peran antara kepolisian dan dinas terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan model kolaborasi lintas sektor dalam program ketahanan pangan berbasis komunitas di wilayah perkotaan.

Kata Kunci: collaborative governance, Kebijakan Pertanian Perkotaan, ketahanan pangan, Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan global menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan konflik geopolitik. Produksi pertanian dunia

memang mengalami peningkatan sebesar 54% dari 2001 hingga 2021, mencapai 9,5 miliar ton. Namun, angka ini tidak sebanding dengan proyeksi kebutuhan pangan bagi populasi global yang diperkirakan mencapai 9,6 miliar jiwa pada 2050 (Panggabean et al., 2024). Krisis multidimensi ini memicu peningkatan kerawanan pangan akut di 59 negara, dengan 282 juta orang mengalami kelaparan parah pada 2023. Laporan FAO juga mencatat bahwa 733 juta orang mengalami malnutrisi, sementara 2,8 miliar lainnya kesulitan mengakses diet sehat akibat inflasi harga pangan (Xinhua, 2024). Di Indonesia, ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ketergantungan impor pada komoditas strategis seperti kedelai (80-90%) dan bawang putih (90-95%). Kerentanan ini semakin diperparah oleh perubahan iklim, dengan proyeksi kenaikan suhu global sebesar 0,15°C per dekade di Indonesia serta ancaman penurunan hasil panen sebesar 20-30% akibat cuaca ekstrem (Herlambang, 2023).



Sumber: Economist Impact

Gambar 1. Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2012-2021

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang disusun oleh Economist Impact, terlihat adanya fluktuasi dalam skor indeks dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di angka 52,5, yang kemudian mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 62,4 pada tahun 2018. Kenaikan indeks ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan di Indonesia selama periode tersebut. Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2018, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 60,4 pada tahun 2019, bahkan terus menurun hingga 59,2 pada tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tantangan perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi global, serta dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi distribusi dan produksi pangan.

Sejak tahun 2010 hingga 2019 melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi, Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyelenggarakan Kegiatan Kawasan Rumah Tangga (KRPL). Namun pada tahun 2020 program ini telah berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

yang merupakan upaya untuk memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan (Musthofa et al., 2023). Pada tahun 2025 program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) mulai berkembang menjadi program baru yaitu Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan untuk peningkatan gizi keluarga dan pendapatan rumah tangga serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura (sayur dan buah) dan komoditas pangan (Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2025). Program ini dilaksanakan lewat pemanfaatan lahan tidur, pekarangan, dan lahan kosong non produktif menjadi penghasil pangan untuk memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta mengarah kepada pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021).

Melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024. Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini merupakan program yang dilakukan dengan upaya membudidayakan taman untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, adanya program tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat karena lokasinya yang berdampingan dengan rumah tinggal mereka sehingga memudahkan mereka untuk memantau dan memelihara tanaman juga dapat membantu masyarakat memiliki peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga (Haslinda et al., 2023).

Salah satu lokasi penerapan program ini adalah Kampung Edukasi Sampah RT.23 RW.07, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, yang menjadi pusat edukasi lingkungan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Program ini diluncurkan oleh Polsek Kota Sidoarjo pada 24 Februari 2025, dengan dukungan dari Babinsa, perwakilan Kecamatan Sidoarjo, Kepala Kelurahan Sekardangan, serta kader lingkungan setempat. Polsek Kota Sidoarjo berperan dalam memberikan sosialisasi, pendampingan teknis, serta dukungan keamanan dan koordinasi antar aktor, kelompok wanita tani (KWT), masyarakat setempat, serta perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo juga terlibat dalam mendukung program ini, baik dalam penyediaan sarana produksi pertanian maupun pendampingan kepada warga (Kampung Edukasi Sampah, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Hidayat et al. (2024) yang meneliti tata kelola kolaboratif dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat petani, dan pemangku kepentingan lain telah terjalin, masih terdapat hambatan dalam pembagian tugas yang jelas serta keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas implementasi.

Meskipun studi sebelumnya telah membahas aspek *collaborative governance* dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan, penelitian khusus mengenai kolaborasi dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), terutama di Kota Sidoarjo, masih sangat terbatas. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana mekanisme kolaborasi antar aktor dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme *collaborative governance* diterapkan dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kampung Edukasi Sampah. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi antar aktor dalam implementasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kampung Edukasi Sampah, Kabupaten Sidoarjo. Berangkat dari uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat topik ini guna menganalisis mendukung ketahanan pangan berbasis komunitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* adalah bentuk tata kelola di mana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus, guna merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan serta mengelola program dan aset publik. Mereka mengidentifikasi enam karakteristik utama: forum kolaboratif diinisiasi oleh institusi publik, melibatkan aktor non-pemerintah, partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, forum yang terorganisasi secara formal, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan fokus pada kebijakan atau manajemen publik. Keberhasilan model ini bergantung pada tiga elemen kunci, yaitu kondisi awal (seperti sejarah hubungan dan distribusi kekuasaan), desain institusional yang mendukung partisipasi, serta kepemimpinan yang fasilitatif. Dalam konteks Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), pendekatan ini relevan untuk mendorong keterlibatan aktif dan setara antaraktor guna mencapai ketahanan pangan berkelanjutan melalui dialog, kepercayaan, dan hasil bersama.

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan inovasi berkelanjutan dari Kementerian Pertanian yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, khususnya di daerah prioritas stunting dan rawan pangan. Program ini mendorong pemanfaatan lahan pekarangan, lahan kosong, atau lahan tidur untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021). Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat untuk menciptakan sumber pangan berkelanjutan yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kontribusi ekonomi rumah tangga (Azizah et al., 2022).

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan didefinisikan secara hukum melalui UU No. 7 Tahun 1996 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, mencakup aspek ketersediaan, mutu, keamanan, pemerataan, dan keterjangkauan. Ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama: ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan aksesibilitas terhadap pangan (Sugiyana et al., 2024). Namun, ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk fluktuasi produksi akibat perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana, dan ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti beras (Rajab, 2023).

3. METODE PENELITIAN

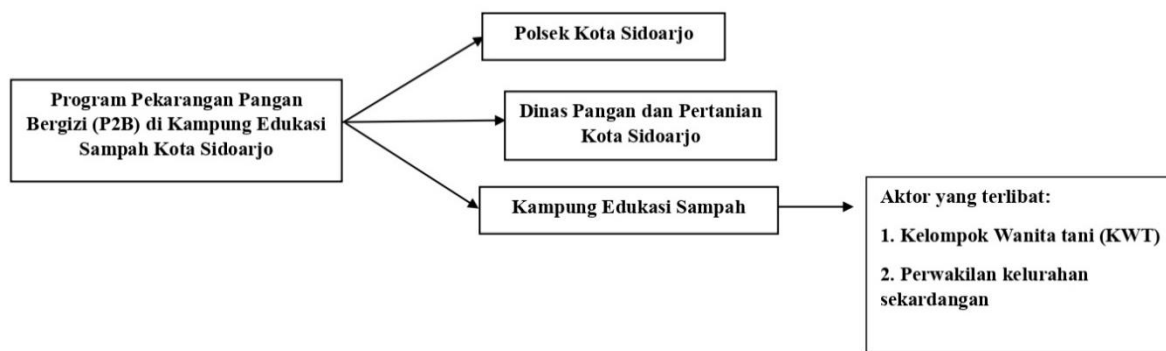
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami penerapan *collaborative governance* dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Sugiyono, 2017). Lokus penelitian berada di Kampung Edukasi Sampah, Kelurahan Sekardangan, yang merupakan salah satu wilayah aktif implementasi program Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama, seperti Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo, Polsek Kota Sidoarjo, aparat Kelurahan Sekardangan, kelompok tani, dan kader lingkungan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program dan interaksi antaraktor. Data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, laporan program, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup lima indikator: *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the Process*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcome*, untuk menilai sejauh mana kolaborasi antaraktor mendukung ketahanan pangan di tingkat komunitas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data serta informasi dari berbagai informan (Sugiyono, 2013 dalam Alfansyur & Mariyani, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai salah satu strategi dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo. Program ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan dan inisiatif lokal yang sebelumnya telah dilaksanakan, seperti Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kehadiran Program P2B memperkuat pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Penerapan *collaborative governance* dalam program ini terlihat dari keterlibatan berbagai aktor lintas sektor, yang secara aktif berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Beberapa aktor yang terlibat antara lain: Polsek Kota Sidoarjo, Babinsa, perwakilan Kecamatan Sidoarjo, Kepala Kelurahan Sekardangan, kader lingkungan, kelompok wanita tani (KWT), masyarakat setempat, serta Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo. Masing-masing aktor memainkan peran spesifik dalam mendukung keberhasilan program: Polsek berperan dalam memberikan sosialisasi, pendampingan teknis, serta memastikan keamanan dan koordinasi antaraktor, sementara Dinas Pangan dan Pertanian berperan dalam penyediaan sarana produksi pertanian serta pendampingan dan pembinaan kepada warga.

***Collaborative Governance* dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo**

Pada bagian ini, Mengacu pada teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas aktor tersebut dapat dianalisis melalui lima tahapan utama, yakni dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil antara (*intermediate outcomes*). Proses ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan atau program yang telah tersedia, tetapi juga pada kemampuan setiap aktor untuk membangun kerja sama yang sinergis guna mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat.



Dialog Tatap Muka Langsung (*face to face dialogue*)

Dalam model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam membangun pondasi kerja sama antar aktor. Melalui dialog langsung, para pemangku kepentingan dapat menyampaikan gagasan, memperjelas kepentingan masing-masing, serta menyamakan persepsi dan tujuan bersama. Dialog tatap muka ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan, komitmen, dan kesepahaman yang

Sumber: (Diolah Penulis, 2025).

Gambar 2. Pola Kolaborasi dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kampung Edukasi Sampah Kota Sidoarjo (2025)

menjadi inti dari kolaborasi yang efektif. Dalam konteks pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kabupaten Sidoarjo, dialog tatap muka dilakukan secara intensif antara berbagai aktor, baik secara formal dalam bentuk forum koordinasi, rapat lintas sektor, maupun secara informal melalui kunjungan lapangan dan kegiatan penyuluhan. Beberapa dialog awal yang krusial dilakukan oleh pihak kepolisian (Polsek Kota Sidoarjo) bersama dengan Babinsa, perwakilan Kecamatan Sidoarjo, Kepala Kelurahan Sekardangan, serta kader lingkungan dan kelompok wanita tani (KWT), dengan tujuan menyusun strategi pelaksanaan program dan membagi peran sesuai kapasitas masing-masing pihak.

Kegiatan dialog ini menjadi kunci terbentuknya kesepakatan awal mengenai lokasi penerapan program, yaitu di RT 23 RW 07 Kelurahan Sekardangan, yang selanjutnya dikenal sebagai Kampung Edukasi Sampah. Dalam dialog tersebut, dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari penyediaan lahan, distribusi bibit dan sarana produksi, hingga pembagian tanggung jawab antara dinas terkait dan komunitas lokal. Pihak Kepolisian (Polsek Kota Sidoarjo), sebagai salah satu aktor utama, turut hadir dalam dialog tersebut untuk memberikan informasi teknis serta menjelaskan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retno Sugiono selaku penanggung jawab Kampung Edukasi Sampah, beliau menyampaikan bahwa:

“Memang benar, Mbak, dari pihak kepolisian langsung yang terjun untuk kebijakan mengenai ketahanan pangan ini. Mereka melakukan survei ke sini. Adapun alasan mengapa lokasi ini dipilih menjadi salah satu tempat pelaksanaan program, karena memang di sini sudah tersedia lahan tidurnya dan cocok untuk program tersebut. Kampung Edukasi Sampah juga memang sudah memiliki tanaman hidroponik, jadi lebih mudah untuk mengimplementasikan programnya,” (Wawancara, 1 Mei 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan Kampung Edukasi Sampah sebagai lokasi implementasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari dialog langsung (tatap muka) antara pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pihak kepolisian berperan aktif dalam proses awal kolaborasi, termasuk melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi potensi wilayah dan kesiapan infrastruktur lokal. Lebih lanjut, kesiapan Kampung Edukasi Sampah yang sudah memiliki fasilitas seperti lahan tidur serta praktik budidaya hidroponik sebelumnya menjadi pertimbangan strategis dalam memilih lokasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan secara top-down, tetapi berbasis pada pendekatan partisipatif dan dialog antaraktor, sesuai dengan prinsip dalam *Collaborative Governance*.

Dialog tatap muka ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi menjadi proses berkelanjutan yang memperkuat relasi antaraktor. Setiap kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi lapangan menjadi ajang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, dalam sesi pelatihan budidaya tanaman, warga diberikan kesempatan menyampaikan kendala secara langsung, dan pihak dinas memberikan solusi secara real time. Interaksi semacam ini memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap program dan mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahap pelaksanaan.

Proses dialog tatap muka juga mencerminkan nilai partisipatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Newman (2017) dalam (Sartika, 2024), bahwa dialog kolaboratif yang efektif ditentukan oleh tingkat partisipasi, pemahaman bersama, dan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini, keberhasilan dialog tatap muka dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam memberikan ide, kesiapan aktor dalam mendengarkan dan merespons masukan, serta keberhasilan dalam menyepakati langkah-langkah kerja kolaboratif yang realistis dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, dialog tatap muka dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) bukan hanya menjadi tahap awal komunikasi, melainkan juga menjadi mekanisme penguat

sinergi antaraktor. Keberhasilan dialog ini turut menentukan keberlanjutan program dan menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan serta menciptakan komitmen kolektif demi terwujudnya ketahanan pangan berbasis masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembangunan kepercayaan atau *trust building* merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance* Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kabupaten Sidoarjo. Kepercayaan merupakan elemen krusial yang memungkinkan terjadinya kerja sama lintas aktor secara efektif, termasuk di dalamnya pemerintah daerah melalui Dinas Pangan dan Pertanian, aparat kepolisian sektor, kelompok tani, kader lingkungan, dan masyarakat umum. Dalam praktiknya, kepercayaan tersebut dibentuk secara gradual melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan tatap muka yang rutin, transparansi informasi, pelibatan langsung dalam kegiatan program, serta adanya ruang dialog yang terbuka untuk menyampaikan masukan dan kritik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ansell dan Gash (2008) dalam (Kurniadi, 2020), *trust building* merupakan proses dinamis yang harus dibangun sejak awal kolaborasi dan dipelihara secara berkelanjutan melalui interaksi yang konsisten, terbuka, dan partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan di antara aktor-aktor pelaksana Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Sidoarjo terbentuk seiring meningkatnya intensitas forum dialog, baik melalui penyuluhan maupun pertemuan komunitas yang melibatkan penyuluh pertanian, kader lingkungan, serta warga. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga juga meningkat secara bertahap setelah mengikuti beberapa sesi pembinaan tersebut.

Dukungan terhadap proses ini turut datang dari kepolisian sektor setempat sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan wawancara dengan Pak Harka, Staf Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polsek Sidoarjo, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dari kami memang selalu ada penyuluhan, kami ada monitoring dengan masyarakat untuk hasil pertaniannya. Kami selalu menjadwalkan pembinaan dan juga penyuluhan, biasanya itu diatur oleh bhabinkamtibmas atau dijadwalkan bersama orang-orang dari Kampung Edukasi Sampah. Tapi untuk saat ini masih belum karena masih dalam proses menanam.” (Wawancara, 29 April 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari unsur keamanan dalam mendukung keberlangsungan program, meskipun pelaksanaan kegiatan masih menyesuaikan dengan siklus tanam yang sedang berjalan. Hal ini memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dan

koordinasi dalam menjaga kepercayaan antarpihak, khususnya di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya.

Lebih lanjut, proses membangun kepercayaan juga didukung oleh kehadiran aktor-aktor lokal yang memainkan peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi pemerintah. Kader lingkungan, misalnya, menjadi elemen penting dalam menjembatani komunikasi, mengorganisasi partisipasi warga, serta menjaga kesinambungan program di tingkat akar rumput. Peran ini secara tidak langsung memperkuat modal sosial dalam komunitas, termasuk jaringan kepercayaan antarwarga, nilai gotong royong, serta norma saling membantu yang telah mengakar dalam budaya lokal. Dengan demikian, P2B tidak sekadar menjadi program top-down yang digerakkan oleh negara, melainkan berubah menjadi inisiatif kolaboratif yang berakar dari kebutuhan dan potensi lokal, serta ditopang oleh kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Namun demikian, proses pembangunan kepercayaan (*trust building*) dalam implementasi Program Pekarangan Pangan Bergizi di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah belum adanya dokumen formal atau nota kesepahaman (MoU) antarinstansi yang berperan dalam pelaksanaan program, sehingga menimbulkan kebingungan dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan struktur koordinasi ini berdampak pada kesenjangan komunikasi, khususnya antara pihak kepolisian dan kelompok pelaksana di tingkat kelurahan maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri, staf Kelurahan Sekardangan, beliau menyampaikan bahwa:

“Betul sekali, Mbak. Kadang programnya dari kepolisian itu mendadak, jadi kurang koordinasi dengan pihak kelurahan, membuat kami bingung dan kurang merasa terlibat.” (Wawancara, 29 April 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketidaksinkronan antaraktor yang berdampak langsung pada keterlibatan dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dari pihak kelurahan sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal. Koordinasi yang tidak terencana dengan baik dapat menghambat proses pembentukan kepercayaan, karena masing-masing pihak merasa tidak diikutsertakan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan lapangan.

Selain persoalan koordinasi, tantangan lainnya adalah perbedaan kepentingan dan orientasi antara aktor-aktor yang terlibat. Institusi pemerintah seperti dinas atau aparat keamanan cenderung memiliki pendekatan birokratis dan prosedural, sementara masyarakat

dan komunitas lokal cenderung fleksibel serta berorientasi pada kebutuhan praktis dan harian. Perbedaan pendekatan ini dapat memicu ketegangan, terutama dalam proses penentuan sasaran penerima manfaat, mekanisme distribusi bantuan, atau evaluasi keberhasilan program. Dalam beberapa kasus, ditemukan potensi konflik kepentingan yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan tingkat kepercayaan antaraktor dan menghambat keberlanjutan program.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan relatif telah terbangun di tingkat dasar melalui interaksi informal dan komunikasi personal, masih diperlukan penguatan di aspek struktural dan kelembagaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kesepakatan bersama (formal agreement), peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme evaluasi kolaboratif yang melibatkan semua aktor secara setara. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa kepercayaan yang telah terbangun tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melembaga dan mampu menopang keberlanjutan kolaborasi.

Secara keseluruhan, kepercayaan merupakan motor utama yang menggerakkan kolaborasi dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi. Keberadaan kepercayaan menciptakan iklim kerja sama yang kondusif, meminimalkan potensi konflik, serta memperkuat komitmen kolektif terhadap tujuan bersama, yaitu peningkatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa proses *trust building* bukan semata-mata ditentukan oleh intensitas pertemuan atau komunikasi, tetapi juga oleh konsistensi perilaku, kejelasan peran, dan kualitas kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, strategi penguatan kepercayaan perlu dirancang secara sistematis, menyeluruh, dan adaptif terhadap dinamika sosial, agar pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif di tingkat lokal.

Komitmen Dalam Proses Kolaborasi (*Commitment to the process*)

Commitment to the process atau komitmen terhadap proses merupakan cerminan dari kesadaran akan ketergantungan satu sama lain akan suatu proses, rasa kepemilikan bersama dalam jalannya suatu proses, serta kesiapan untuk menggali suatu manfaat yang dapat diperoleh bersama (Ansell & Gash, 2008). Artinya komitmen merupakan sebuah dorongan yang melibatkan para aktor untuk berpartisipasi, bertanggung jawab, dan memandang sebuah kerjasama sebagai hal baru yang perlu dikembangkan dalam proses *collaborative governance*. Komitmen ini merupakan suatu komponen yang penting dalam keberlanjutan kolaborasi, karena komitmen menggambarkan bagaimana akuntabilitas dan konsistensi para aktor yang terlibat.

Tabel 1. Commitment to the process dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kampung Edukasi Sampah Kota Sidoarjo (2025)

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	POLSEK Sidoarjo Kota	Program ini merupakan inisiasi POLRI untuk mendukung program ketahanan pangan, bentuk bantuan utama yang diberikan adalah bibit jagung. Namun, kami juga berfokus pada pemanfaatan lahan tidur agar berguna bagi masyarakat sekitar lahan itu.
2.	Kelurahan Sekardangan	Kami sebelumnya tidak tau adanya program ini, namun pada saat melakukan launching program ini bertempat pada Kampung Edukasi Sampah yang ada di wilayah kelurahan kami. Sehingga, kami turut mengawal saat program ini akan di mulai.
3.	Kampung Edukasi Sampah	Kampung Edukasi Sampah sebelumnya memang sudah memiliki beberapa komponen yang dimanfaatkan untuk memanfaatkan wilayah sekitar atau lahan tidur yang ada. Seperti adanya tanaman hidroponik dan kolam lele, yang hasilnya memang diberikan untuk warga sekitar. Melihat kesiapan kami ini POLSEK Sidoarjo kota langsung menghubungi kami untuk melakukan launching Program Ketahanan pangan yang akan mereka jalankan.

Sumber: (Diolah Penulis, 2025)

Membangun Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Kesamaan pemahaman (*shared understanding*) di antara seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan *collaborative governance* Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dari Dinas Pangan dan Pertanian serta kader lingkungan, upaya menyamakan persepsi dilakukan melalui sosialisasi rutin, pelatihan teknis pemanfaatan lahan pekarangan, serta dialog partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan perangkat desa.

Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman atas tujuan program, yaitu memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga, serta pembagian peran antara aktor pemerintah,

masyarakat, dan mitra pendukung. Contohnya, kader lingkungan memahami bahwa mereka bertugas mendampingi warga dalam pemanfaatan pekarangan, sedangkan Dinas berperan sebagai fasilitator pelatihan dan distribusi bibit. Hal ini memperlancar koordinasi dan meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Namun demikian, proses membangun kesepahaman ini tidak berjalan tanpa tantangan. Temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi di awal program, terutama antara aparat desa yang melihat program sebagai instruksi dari atas (*top-down*), sementara kelompok masyarakat mengharapkan partisipasi yang lebih aktif. Misalnya, dalam satu kegiatan sosialisasi di Kelurahan Sekardangan, beberapa warga menyatakan bahwa mereka belum memahami secara menyeluruh manfaat jangka panjang dari P2B, sehingga partisipasinya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu efektif menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, belum adanya dokumen formal yang memuat kesepakatan visi dan tujuan antaraktor menyebabkan koordinasi masih bersifat informal dan rentan terhadap miskomunikasi. Peran fasilitator menjadi sangat penting dalam menjaga kesinambungan dialog dan merespons perbedaan persepsi yang muncul di lapangan. Kesamaan pemahaman yang kuat terbukti mampu meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program. Ini tercermin dari inisiatif warga yang secara mandiri memperluas pemanfaatan lahan pekarangan tanpa menunggu bantuan dari pemerintah (Astuti et al., 2020). Dengan demikian, *shared understanding* bukan hanya memperkuat sinergi antaraktor, tetapi juga menjadi mekanisme adaptif dalam menghadapi dinamika lokal. Hal ini sejalan dengan model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan kesepahaman bersama sebagai prasyarat terbentuknya kebijakan kolaboratif yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Hasil Sementara (*Intermediate outcome*)

Intermediate outcome adalah hasil sementara dari sebuah kerjasama yang telah dilakukan. Hasil ini menunjukkan sejauh mana proses kolaborasi ini berjalan, selanjutnya hasil sementara ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bekal dalam melakukan perbaikan dalam proses kerjasama kedepannya (Ansell & Gash, 2008). Sejalan dengan itu, penerapan tata kelola kolaboratif ini juga mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kolaborasi ini bukan hanya menghasilkan capaian secara teknis saja, tetapi juga berguna untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Proses kolaborasi dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini POLSEK Sidoarjo Kota pada saat ini telah menjalankan program sesuai dengan amanat POLRI yang menginisiasi program untuk membantu mensukseskan ketahanan pangan. POLSEK Sidoarjo Kota terus berupaya memberdayakan potensi lahan tidur yang ada agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dan kedepannya mampu untuk mendukung program makan bergizi. Selanjutnya, Kelurahan Sekardangan sendiri yang awalnya tidak tau menau akan program ini akhirnya tetap berkomitmen untuk terus mengawal dan membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik. Sedangkan untuk kampung edukasi sampah, mereka akan terbuka untuk bantuan yang akan diberi, terlebih kampung mereka telah memiliki sarana yang cukup memadai untuk membantu program tersebut.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dapat dikatakan bahwasannya kolaborasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini pada tahap *intermediate outcome* karena telah menunjukkan komitmen, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, serta capaian awal yang dapat dievaluasi untuk perbaikan proses kolaborasi kedepannya. Selain itu adanya program ini turut membantu masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antaraktor telah terbentuk dengan cukup baik dan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo, kepolisian, kelompok masyarakat Kampung Edukasi Sampah, serta unsur kecamatan, kelurahan, dan kader lingkungan. Proses *face-to-face dialogue* telah dijalankan dengan baik melalui pertemuan-pertemuan koordinatif baik formal maupun informal yang menjadi wadah awal dalam membangun komunikasi, saling memahami peran, serta menentukan arah kerja sama. Selain itu, pada aspek *shared understanding*, para aktor telah menunjukkan adanya kesamaan visi dalam mendukung ketahanan pangan lokal, khususnya melalui pemanfaatan lahan tidur yang telah lebih dulu digunakan oleh masyarakat di Kampung Edukasi Sampah untuk kegiatan hidroponik, sehingga memudahkan dalam implementasi program P2B. Program ini juga menunjukkan tanda-tanda keberhasilan awal pada aspek *intermediate outcomes* melalui terbentuknya lahan tanam produktif dan munculnya kegiatan masyarakat berbasis pangan bergizi.

Namun demikian, pada aspek *commitment to the process*, ditemukan bahwa belum seluruh pihak yang terlibat memiliki dokumen kesepakatan atau perjanjian tertulis yang secara formal memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Meskipun telah terdapat MoU antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Sidoarjo dengan Kepolisian, kerja sama antara pihak kepolisian dan Masyarakat Kampung edukasi Sampah setempat belum dituangkan dalam dokumen resmi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan peran serta keberlanjutan komitmen ke depan. Hal ini semakin diperparah dengan masih rendahnya intensitas dan kualitas komunikasi antarpihak yang menyebabkan sering terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kelemahan dalam aspek komunikasi ini berdampak pada lemahnya koordinasi di lapangan, yang juga berkaitan dengan aspek *trust building*, karena kurangnya komunikasi berkelanjutan dapat menghambat terbentuknya kepercayaan yang kokoh antaraktor.

Selain itu, minimnya penyuluhan dan edukasi dari dinas teknis kepada masyarakat dalam memahami teknis budidaya serta tujuan jangka panjang program menunjukkan bahwa aspek *shared understanding* pun masih perlu diperkuat. Terdapat pula tumpang tindih peran antara pihak kepolisian dan Dinas Pangan dan Pertanian yang belum dikelola secara jelas, sehingga mengaburkan pembagian tanggung jawab di lapangan dan berisiko melemahkan efektivitas pelaksanaan kolaborasi. Dengan demikian, meskipun kolaborasi dalam Program P2B telah menunjukkan arah positif, diperlukan penguatan pada aspek *commitment to the process*, *trust building*, dan *shared understanding* agar kolaborasi dapat lebih terstruktur, berkelanjutan, serta menghasilkan dampak yang signifikan bagi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR REFERENSI

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik* (1st ed.).
- Azizah, B. O. P., Soedarto, T., & Parsudi, S. (2022). Pemanfaatan lahan pekarangan dan peran kelompok wanita tani melalui program pekarangan pangan lestari di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(3), 956–970. <http://dx.doi.org/10.25157/jimag.v9i3.7905>

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2021). *Petunjuk teknis bantuan pemerintah kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2021*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. (2025, March 6). *Sosialisasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)*. https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/67_sosialisasi-program-pekarangan-pangan-bergizi-p2b
- Haslinda, Aisyah, S., & Syah, I. (2023). Optimalisasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Jurnal Berita Sosial*, 8(2), 126–134.
- Herlambang, D. (2023). Tidak pandang bulu, krisis pangan hantui seluruh negara tahun 2050. *BMKG*. <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/tidak-pandang-bulu-krisis-pangan-hantui-seluruh-negara-tahun-2050>
- Hidayat, S. S., Tri Lestari, E. W., & Nurliawati, N. (2024). Model tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance) dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(3), 269–286.
- Kampung Edukasi Sampah. (2025). Polsek Kota Sidoarjo luncurkan program penguatan Pekarangan Pangan Lestari. <https://kampungedukasisampah.id/news-166-polsek-kota-sidoarjo-luncurkan-program-penguatan-pekarangan-pangan-lestari>
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Infrastruktur*.
- Musthofa, M. S., Sugihardjo, & Permatasari, P. (2023). Strategi implementasi program Pekarangan Lestari (P2L) dalam menuju ketahanan pangan berkelanjutan di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, 7(1), p-ISSN.
- Panggabean, R., Chalidah, S. N., Karina, G., & Haniy, S. U. (2024). Membangun ketahanan pangan Indonesia 2030. *WRI Indonesia*. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/membangun-ketahanan-pangan-indonesia-2030>
- Rajab, A. (2023). Tinjauan kritis anggaran ketahanan pangan dan impor komoditas beras menurut peraturan perundang-undangan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 100–116. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.149>
- Sartika, I. (2024). Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 209–233. <https://doi.org/10.33701/jiagd.v14i2>
- Sugiyana, L. U. T., Hariyono, W., & Handayani, L. (2024). Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk meningkatkan ketahanan wilayah: Studi tinjauan pustaka. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 9(2), 110. <https://doi.org/10.35842/formil.v9i2.547>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Xinhua. (2024). FAO: Sekitar 282 juta orang alami kerawanan pangan akut pada 2023. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/4074351/fao-sekitar-282-juta-orang-alami-kerawanan-pangan-akut-pada-2023>